



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/39 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Program pembentukan Perda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati Kebumen untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 November 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



SAMAN

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025**

No	Nama/Judul	Maksud dan Tujuan	Pelaksanaan	Status		Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Pem- bahasan
				Baru	Ubah	NA	Keterangan /Penjelasan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen	Menyesuaikan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Delegasi	√		√		Bagian Perekonomian	MS I
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen	1. Melaksanakan ketentuan Pasal 333 Ayat (1) UU Pemda dan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD 2. Penyesuaian terhadap jumlah dan jangka waktu penyertaan modal pada BUMD, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 jangka waktu sampai dengan tahun 2025	Delegasi	√		√		Bagian Perekonomian	MS I
3.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan	Mewujudkan payung hukum perlindungan bagi perempuan di Kabupaten Kebumen	INISIATIF DPRD	√		√		DPRD	MS I
4.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan Anak	Mewujudkan payung hukum perlindungan bagi anak di Kabupaten Kebumen	INISIATIF DPRD	√		√		DPRD	MS I

5.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1. Melaksanakan amanat Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah 2. Memenuhi MCP KPK	Delegasi	√		√		DISPERKI MHUB	MS I
6.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	Melaksanakan amanat Pasal 70 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Delegasi	√		√		BAPPEDA	MS II
7.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Disusun untuk mewadahi kebutuhan dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat lanjut usia di Kabupaten Kebumen	INISIATIF DPRD	√		√		DPRD	MS II
8.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Satu Data Kabupaten Kebumen	Disusun untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum dan kebijakan tentang pengelolaan satu data di Kabupaten Kebumen	INISIATIF DPRD	√		√		DPRD	MS II

9.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah perlu penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah dengan mendasarkan pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019	Delegasi		√		√	Bagian Organisasi	MS II
10.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Melaksanakan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kumulatif Terbuka	√		√		BPKPD	KUMU-LATIF /II
11.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan Daerah	Kumulatif Terbuka	√		√		BPKPD	KUMU-LATIF /II
12.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan Daerah	Kumulatif Terbuka	√		√		BPKPD	KUMU-LATIF /III
13.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Penyesuaian terhadap kebutuhan ketertiban umum di masyarakat	Atribusi		√		√	SATPOL PP	MS III
14.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Kawasan Taman Bumi [Geopark] Kebumen	Disusun dalam rangka pengembangan Geopark Kebumen	Atribusi	√		√		BAPPEDA	MS III

15.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Disusun sebagai upaya untuk mengoptimalkan eksistensi dari usaha kecil dan mikro dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	INISIATIF DPRD	√		√		DPRD	MS III
-----	---	--	----------------	---	--	---	--	------	--------

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

